BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan merupakan sarana yang paling efektif untuk menyebarkan informasi, termasuk tentang gizi dan cara mencegah *stunting* atau malnutrisi kronis, yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Seorang anak di bawah usia lima tahun dikatakan *stunting* jika tinggi badannya terlalu kecil untuk usianya sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis yang mencegahnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal. Kekurangan gizi terjadi selama masa kehamilan dan masa awal kehidupan bayi, yaitu periode 1000 hari pertama kehidupan[1]. Masalah kesehatan pada masa kanak-kanak akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, maka upaya menurunkan angka *stunting* ini harus diprioritaskan.

Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 mengamanahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menyediakan sumber daya bagi guru PAUD mengenai penanganan dan perawatan *stunting* untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, melalui Direktorat Guru PAUD diwajibkan dapat mempersiapkan 20 orang pelatih di setiap kabupaten atau kota yang memiliki pengetahuan tentang topik gizi, kesehatan, stimulasi, dan pengasuhan *stunting*. Untuk mengurangi *stunting*, maka diperlukan peningkatan komunikasi tentang perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat dengan memperkuat kapasitas kelembagaan. Diharapkan guru-guru PAUD akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai stimulasi penanganan *stunting*, dan setidaknya akan ada 20 orang pelatih tingkat dasar. Selain itu, diharapkan pada tahun 2024, 90% desa atau kelurahan memiliki pendidik PAUD yang terlatih untuk menangani *stunting* sebagai hasil dari pendidikan dan pelatihan di kabupaten dan kota.[2]

---

[1] Noor Latifah et al., "Systematic Literature Review : Stunting pada Balita di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya," *Kedokteran dan Kesehatan* 20, no. 1 (2024): hal. 55–73, https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/view/12489.

[2] Esti Kisriyanti dan Anggi Pratami Dewi, "Optimalisasi Peran Pendidik PAUD dalam Program Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tegal," *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* 5, no. 1 (2022): hal. 376–380, http://pps.unnes.ac.id/pps2/prodi/prosiding-pascasarjana-unnes.

Jumlah kabupaten dan kota yang memiliki minimal 20 tenaga pendidik PAUD tingkat dasar dan pendidikan dan pelatihan stimulasi penanganan *stunting* untuk guru PAUD telah meningkat menjadi 84,7% dari seluruh kabupaten dan kota, atau sekitar 435 kabupaten dan kota, dari target 100% di tahun 2023, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).[3] Meskipun demikian, pelatihan stimulasi penanganan *stunting* untuk guru diperlukan pada tahun 2024 untuk kabupaten dan kota tertentu yang pencapaiannya masih di bawah standar.

Selain itu, desa dan kecamatan yang telah melatih guru PAUD dalam stimulasi pengasuhan penanganan *stunting* sebagai hasil dari pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota mencapai 60,2% dari target 90% di tahun 2024, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas (Satgas) *Stunting* mengenai Pencapaian Renstra Nasional.[4] Mengingat pencapaian ini masih relatif rendah, desa dan kecamatan harus bertindak cepat untuk mengembangkan strategi perekrutan yang inovatif dan sesuai untuk guru PAUD yang telah menerima pelatihan dan pendidikan di kabupaten/kota.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, adalah program pengembangan anak usia dini yang berupaya memenuhi berbagai kebutuhan dasar anak secara bersamaan, metodis, dan terpadu.[5] Sebagaimana diketahui, layanan esensial dalam PAUD HI adalah layanan stimulasi gizi, kesehatan, dan perawatan serta layanan pengasuhan. Kedua layanan ini secara langsung berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan *stunting* pada anak.[6]

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menurunkan angka *stunting* dengan lebih cepat sejak meluncurkan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan *Stunting* pada tahun 2018. Lima pilar utama dari strategi ini adalah

---

[3] Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting, *Laporan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 Semester 1*, 2024: hal. 31.
[4] Satgas Stunting, *Capaian Rencana Strategis Nasional*, 2024, https://satgasstunting.info/web/stranaspps.php.
[5] "Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif,".
[6] Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, "Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Teknis Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Satuan PAUD" (Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan, 2023): hal. 5.

sebagai berikut: Pilar 1 (Komitmen dan Visi Pimpinan Nasional dan Daerah); Pilar 2 (Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku); Pilar 3 (Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Desa); Pilar 4 (Ketahanan Pangan dan Gizi); dan Pilar 5 (Pemantauan dan Evaluasi).[7] Guru PAUD bertugas melaksanakan proses pembelajaran anak usia dini untuk menstimulasi berbagai bidang perkembangan anak didik. Tujuannya agar anak didik terhindar dari *stunting* sehingga dapat menghasilkan generasi emas dan berkualitas untuk Indonesia di masa depan.

Sebagai hasilnya, pengajar PAUD dapat berkontribusi secara strategis terhadap percepatan penurunan *stunting*. Pendidik anak usia dini dan orang tua mereka terlibat dalam interaksi yang berkelanjutan, dekat, dan langsung dengan guru PAUD. Pendidik PAUD dapat membantu orang tua, rekan sejawat, dan masyarakat dengan mengedukasi mereka tentang pencegahan dan penanganan *stunting*. Dengan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara teratur, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk memberikan stimulasi psikososial dan perkembangan anak yang sesuai dengan usianya, mengembangkan kelas orang tua untuk mengedukasi orang tua tentang *stunting*, dan mengimplementasikan berbagai program di satuan pendidikan mereka, guru PAUD dapat membantu deteksi dini anak-anak yang teridentifikasi mengalami *stunting* melalui kerja sama dengan pusat-pusat layanan kesehatan. Untuk memenuhi peran strategis ini dan memberikan layanan terbaik, guru PAUD harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menangani *stunting* dan mendorong tumbuh kembang anak.[8]

Stunting harus dicegah secara aktif oleh para guru yang berperan sebagai penghubung antara sekolah, orang tua, dan anak-anak. Jika kita melihat lebih dekat pada hal-hal seperti pengembangan karakter, keamanan jajanan sekolah, guru, fasilitas pendukung, pola pembelajaran, dan lain-lain. Kesenjangan yang lebar antara anak-anak dan berbagai jenis sekolah menjadi semakin nyata. Cara pandang dan orientasi hidup seseorang akan terpengaruh oleh paradigma orang

[7] "Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,".
[8] Anik Budi Utami, "Pentingnya Pengetahuan Stunting bagi Guru PAUD," *Direktorat Guru PAUD dan PNF*, last modified 2024, diakses Februari 2, 2025, https://gurupaudpnf.dikdasmen.go.id/artikel/Artikel/pentingnya-pengetahuan-stunting-bagi-guru-paud.

tua dan sekolah yang tidak berada dalam satu frekuensi yang sama, yang juga dibersamai dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Hal ini akan memunculkan sejumlah masalah baru terkait *stunting* di masa depan.[9]

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, sebanyak 80% kabupaten/kota menghadapi lebih dari 11 dari 14 isu/kendala pada intervensi sensitif, salah satunya di bidang PAUD, yaitu kurangnya kualitas pendidik dan pelatihan. Tantangan dalam intervensi sensitif lainnya adalah terbatasnya pengetahuan guru PAUD tentang *stunting*, dan tidak semua lokus desa memiliki PAUD, sehingga diperlukan tindak lanjut berupa peningkatan kapasitas guru PAUD.[10]

Guru PAUD mempunyai peran strategis untuk menyampaikan informasi pengetahuan dan pemahaman kepada anak-anak. Guru PAUD memiliki peran penting dalam mengajarkan anak-anak tentang pencegahan *stunting*. Supaya guru dapat melayani anak-anak secara efektif, pengetahuan ini sangat penting untuk dimiliki.[11] Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Amaliya, tentang peran guru PAUD dalam upaya pencegahan *stunting*, para pendidik ini masih kurang memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang *stunting*, termasuk penyebab, dampak, dan langkah-langkah pencegahannya.[12] Akibatnya, guru PAUD memainkan peran yang kurang ideal, yang akan berpengaruh pada kompetensi mereka.

Saripudin menegaskan bahwa kompetensi profesional guru PAUD masih relatif rendah, yang dibuktikan dengan kemahiran mereka dalam konsep pengembangan anak usia dini, pemahaman tentang kebijakan PAUD, dan

---

[9] Farid Kasim Judas, "Bergerak Bersama untuk Anak Indonesia Bebas Stunting," *Kumparan*, last modified 2023, diakses Februari 26, 2025, https://kumparan.com/jfaridkasim/bergerak-bersama-untuk-anak-indonesia-bebas-stunting-20qz5AhqdGO/full.

[10] Sekretariat BKKBN, "Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Semester Pertama Tahun 2023," 2023, hal. 71–72.

[11] Orisinal et al., "Hubungan Pengetahuan tentang Stunting dengan Akurasi Hasi Deteksi Dini Kasus Stunting pada Anak Oleh Guru PAUD di Wilayah Kerja Puskesmas Samadua Kabupaten Aceh Selatan," *Serambi Akademica* 8, no. 4 (2020): hal. 549.

[12] Gita Rizki Amaliya, "Positive Deviance Program Development To Improve Nutrition of Children in Mojosari Village, Kalitidu," *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* 5, no. 1 (2021): hal. 212.

bidang-bidang lainnya.[13] Selanjutnya, berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, ditemukan bahwa 30% guru PAUD di Indonesia belum mendapatkan peningkatan kompetensi.[14]

Nilai atau skor kompetensi guru di Indonesia masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Sebab nilai rata-rata kompetensi guru berada di 50,64 poin. Kompetensi guru diukur dengan membagi dua kelompok, yaitu kelompok guru yang lulus sarjana dan kelompok guru yang belum sarjana. Guru PNS sudah sarjana memiliki nilai kompetensi 51,43 poin. Guru honorer daerah memperoleh 48,21 poin, guru tetap yayasan memperoleh 52,82 poin, dan guru tidak tetap (GTT) memperoleh 49,19 poin. Selain itu, guru PNS yang belum sarjana mendapatkan 41,45 poin. Guru tidak tetap (GTT) belum sarjana mendapat 42,63 poin, guru honorer daerah belum sarjana mendapat 41,92 poin, dan guru tetap yayasan belum sarjana mendapat 46 poin.[15]

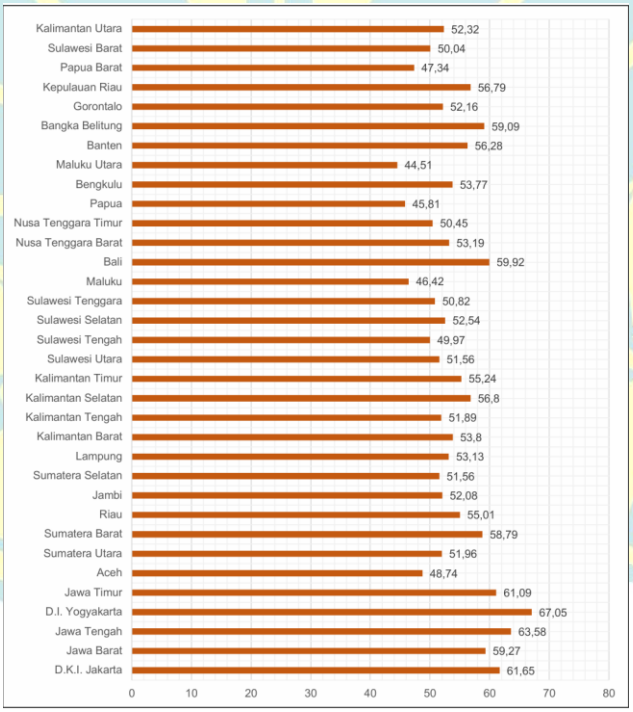

Gambar 1. 1 Grafik Nilai UKG Tahun 2022 di Indonesia

[13] Elya Siska Anggraini, "Peningkatan Kompetensi Keprofesionalan Guru PAUD," *Jurnal Usia Dini* 8, no. 2 (2022): hal. 112.
[14] Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024*, 2024, hal. 9.
[15] Bintang Pradewo, "Kemendikbudristek Ungkap Rata-Rata Skor Kompetensi Guru 50,64 Poin," *JawaPos*, last modified 2021, diakses April 14, 2025, https://www.jawapos.com/pendidikan/01355273/kemendikbudristek-ungkap-ratarata-skor-kompetensi-guru-5064-poin.

Merujuk data Serikat Guru Indonesia (FSGI), kualitas rata-rata guru di seluruh Indonesia di semua tingkat pendidikan masih rendah.[16] Data grafis mengenai nilai UKG Indonesia pada tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.2. Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) belum mencapai standar minimum, yang dibuktikan dengan nilai rata-rata nasional tahun 2022 sebesar 54,05 dengan standar minimum 55. Menurut data resmi yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Lanny Jaya mendapatkan nilai rata-rata terendah yaitu 33,88. Sementara itu, Kota Yogyakarta mendapatkan nilai tertinggi dengan rata-rata 69,12.[17]

Rendahnya hasil UKG ini masih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru tentang teori, metode, dan teknik mengajar; rendahnya kualitas dan kompetensi guru; ketidaksesuaian dengan kegiatan belajar mengajar; rendahnya kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); serta belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) di kabupaten/kota. Pendidik PAUD masih berupaya meningkatkan kemampuan mengajar mereka; beberapa masih kesulitan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran serta menggunakan teknologi yang tersedia saat ini.[18]

Tabel 1. 1 Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

Daerah	Proporsi Pendidik S1/D4 (%)	Proporsi KS S1/D4 (%)	Proporsi PTK Bersertifikat PPG (%)	Proporsi PTK di Diklat Teknis (%)	Standar Kompetensi Pendidik (%)
1. Kabupaten Banyumas	49.71	70.94	41.36	0.8	51.12
2. Kabupaten Cilacap	42.11	59.66	38.3	0.75	51.05
3. Kabupaten Kendal	66.13	74.48	47.27	0.14	50.72
4. Kota Semarang	64.71	74.85	43.19	0.26	52.85
5. Provinsi Jawa Tengah	57.32	73.69	44.07	0.65	51.07

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1, berdasarkan analisis Rapor Pendidikan Jawa Tengah menempatkan kualitas pendidik dan tenaga

[16] Caecilia Mediana, "Kualitas Sebagian Guru Masih Rendah, Hasil Pendidikan Belum Merata," *Kompas*, last modified 2020, diakses April 15, 2025, https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/03/04/kualitas-sebagian-guru-masih-rendah-hasil-pendidikan-belum-merata?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.
[17] Kinanti Geminastiti Hilmiatussadiah, Eeng Ahman, dan D. Disman, "Teacher competency: Descriptive study of Guru Penggerak," *Inovasi Kurikulum* 21, no. 1 (2024): hal. 150–151.
[18] Kristiana Maryani, "Pengaruh Metode Pelatihan dan Pengalaman Mengajar Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru PAUD" (Universitas Negeri Jakarta, 2021), hal. 6.

kependidikan (PTK) pada kategori sedang dengan nilai Standar Kompetensi Pendidik sebesar 51,07%. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa guru PAUD di Jawa Tengah belum terlalu kompeten atau baik.[19] Rendahnya skor ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan profesional, serta evaluasi kinerja yang lebih sistematis.

Tabel 1. 2 Kualifikasi dan Sertifikasi Guru di Jawa Timur

Jawa Timur	
Kualifikasi	**Sertifikasi**
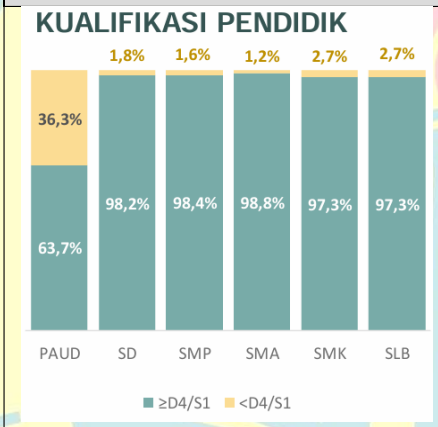	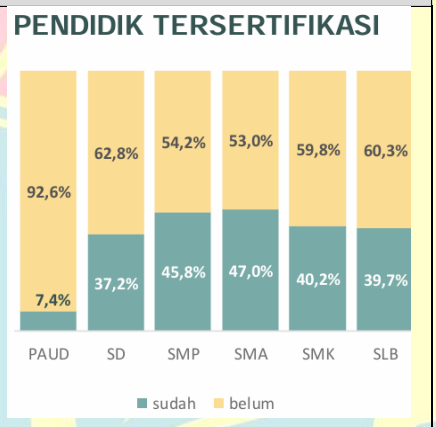

Berdasarkan analisis Laporan Pendidikan Jawa Timur 2023 yang dapat dilihat pada tabel 1.2, ditemukan bahwa 7,4% guru PAUD di Jawa Timur telah tersertifikasi dan 92,6% belum tersertifikasi. Kemudian, 63,7% guru PAUD di Jawa Timur telah berkualifikasi dan 36,3% belum berkualifikasi. Data Neraca Pendidikan Daerah 2022 menunjukkan bahwa hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) di Jawa Timur memiliki nilai rata-rata 61,09 dengan nilai pedagogik 55,67 dan nilai profesional 63,42.[20]

[19] Nurkolis Nurkolis, Muhdi Muhdi, dan Yovitha Yuliejantiningsih, "Urgensi Pengutamaan PAUD dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 5 (2023): hal. 6318–6319.

[20] Ayesha Cesaria Putri Sholihat, "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Profesionalisme Guru di Sekolah Penggerak Jenjang PAUD Angkatan 1 se-Jawa Timur" (Universitas Negeri Jakarta, 2024), hal. 7.

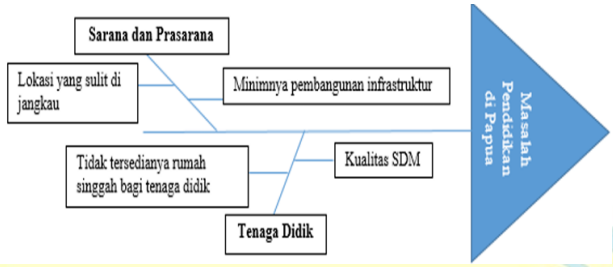

Gambar 1. 2 *Fishbone* Masalah Pendidikan di Papua

Berdasarkan diagram *fishbone* pada gambar 1.3, ketersediaan tenaga pengajar dan infrastruktur merupakan masalah yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia Timur, seperti Provinsi Papua. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tempat tinggal bagi tenaga pengajar dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki.[21] Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur berada di posisi paling rendah, contohnya Papua (63,01%), Maluku Utara (70,98%), Maluku (72,75%), Nusa Tenggara Timur (71,57%) dan Sulawesi Utara (75,04%).[22] Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri. Karena tenaga pengajar di suatu wilayah memiliki dampak langsung terhadap kualitas pendidikannya, banyak wilayah di Indonesia Timur yang masih memiliki kualitas guru yang relatif rendah.[23] Kualifikasi akademik dan non-akademik masih rendah di antara para guru di Indonesia bagian timur, dengan banyak guru yang memiliki kualifikasi di bawah tingkat yang dipersyaratkan (D-4/S-1).[24] Dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya, wilayah Indonesia Timur menunjukkan pencapaian yang relatif rendah, berdasarkan data Uji Kompetensi Guru (UKG) yang ditunjukkan pada grafik di gambar 1.2. Nilai rata-rata dari beberapa provinsi di wilayah timur, contohnya Papua (45,81), Maluku (46,42), Maluku Utara (44,51), Nusa Tenggara Timur (50,45) dan Sulawesi

[21] Firyal Alifah Hisanah et al., "Pembangunan Pendidikan Dengan Meninjau Ketersediaan Sarana Prasarana Serta Tenaga Didik Di Indonesia Timur," *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* 6, no. 1 (2022): hal. 188.
[22] Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2023*, 2024, hal. 27.
[23] Raisya Maulana, "Kesenjangan Mutu Pendidikan di Wilayah Timur Indonesia," *Asian Education and Development Studi* 2, no. 2 (2022): hal. 3.
[24] Ezra Tari, "Kualifikasi Guru berdasarkan 1 Tesalonika 2:7-12," *Khazanah Theologia* 2, no. 1 (2020): hal. 1.

Utara (51,56). Dari semua provinsi tersebut, Maluku Utara bahkan mendapatkan skor terendah.

Berdasarkan Manajemen Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD Non-formal tahun 2021, terdapat 789 pendidik PAUD yang bergelar magister, 80.438 bergelar sarjana, 13.153 bergelar diploma, 138.051 bergelar SMA, dan 26.375 bergelar SMP. Banyak guru PAUD yang melakukan tugas di luar lingkup kewenangannya karena kondisi di lapangan. Mengingat kondisi tersebut, perlu dipastikan bahwa kewenangan setiap guru PAUD sesuai dengan kualifikasi dan tingkat kompetensinya. Sehingga, penting untuk menerapkan kegiatan peningkatan kompetensi yang dapat memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada guru PAUD dengan cara yang nyaman dan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Diharapkan kompetensi guru akan terus meningkat hingga mencapai tingkat yang diperlukan. Diharapkan para pendidik akan terus mengembangkan kemampuan mereka hingga mencapai tolak ukur yang diperlukan.[25]

Guru yang telah lulus ujian sertifikasi guru dianggap telah memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas mengajar, melatih, membimbing, dan mengevaluasi hasil belajar. Hal ini karena sertifikasi guru dimaksudkan sebagai kontrol kualitas hasil pendidikan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta sehat jasmani dan rohani, maka guru yang tidak bersertifikat tidak dapat dianggap sebagai pendidik profesional. Kualifikasi guru akan berdampak pada kemampuan guru untuk mendukung pembelajaran.[26]

Menurut Mujtahid kualifikasi guru menjadi syarat yang penting untuk mewujudkan guru yang berkualitas. Lebih lanjut Mujtahid menyatakan bahwa untuk mengukur kualifikasi guru dapat dilihat dari tiga hal, yaitu kemampuan dasar sebagai pendidik; kemampuan umum sebagai pengajar; kemampuan

[25] Nasruddin et al., *Pedoman Umum Diklat Berjenjang Tingkat Dasar, Lanjut, dan Mahir* (Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2022), hal. 3.
[26] Maryani, "Pengaruh Metode Pelatihan dan Pengalaman Mengajar Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru PAUD," hal. 5–6.

khusus sebagai pelatih.[27] Guru juga harus bertindak sebagai pelatih, karena pendidikan dan pengajaran memerlukan bantuan latihan keterampilan baik intelektual, sikap, maupun motorik. Agar dapat berpikir kritis, berperilaku sopan, dan menguasai keterampilan, warga belajar harus mengalami banyak latihan yang teratur dan konsisten. Tanpa latihan warga belajar tidak akan mungkin mahir dalam berbagai keterampilan, kematangan dan keahlian yang dibutuhkan.[28] Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar, terdapat permasalahan yang dimiliki oleh instruktur dalam kegiatan pelatihan, yaitu mengalami kesulitan di dalam membimbing semua peserta pelatihan secara individu, dan instruktur dalam memilih metode pembelajaran yang kurang kolaboratif.[29]

Berdasarkan artikel yang dirilis oleh Direktorat Guru PAUD dan PNF, ditemukan kesulitan lain yang tidak dapat dihindari, yaitu meningkatnya jumlah guru PAUD yang tidak memiliki kualifikasi dan standar kompetensi. Hal ini sebagian disebabkan oleh munculnya berbagai lembaga PAUD baru yang tidak memenuhi standar di beberapa daerah. Dalam peristiwa ini, pengawasan yang tepat perlu dilakukan untuk menjamin bahwa pendirian PAUD baru memiliki izin dan kualitas serta kompetensi pendidik yang sesuai dengan standar.[30] Sehingga dilaksanakanlah pelatihan untuk meningkatan kemampuan pelatih kabupaten/kota dan guru PAUD desa melalui PAUD HI. Program ini menawarkan kegiatan bimbingan teknis bagi calon pelatih (BCP) di kabupaten/kota yang menjadi fokus utama (lokus), dengan materi yang disempurnakan dengan substansi kesehatan dan gizi.

Namun, dalam Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan BCP Diklat

---

[27] Rusdin, "Pendidikan Dan Pelatihan Sebagai Sarana Peningkatan Kompetensi Guru," *Jurnal Administrative Reform* Vol. 5, No (2017): hal. 201.
[28] Nur Illahi, "Peranan Guru Profesional Dalam Peningkatan Prestasi Siswa Dan Mutu Pendidikan Di Era Milenial," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): hal. 14.
[29] Herlina Siregar, Subhan Widiansyah, dan Dadan Darmawan, "Deskripsi Kompetensi Pedagogik Instruktur Program Pelatihan di LKP Kota Serang Banten," *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 4, no. 2 (2020): hal. 183.
[30] Agung Budiatmoko, "Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting," *Direktorat Guru PAUD dan PNF*, last modified 2024, diakses Februari 2, 2025, https://gurupaudpnf.dikdasmen.go.id/artikel/Artikel/kolaborasi-percepatan-penurunan-stunting.

Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Penurunan *Stunting* tahun 2023 meliputi[31]:

1) Terbatasnya anggaran pembiayaan yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan kegiatan, mengingat lokasi fokus intervensi percepatan penurunan *stunting* di tahun 2023 adalah kabupaten/kota yang berada di wilayah Indonesia Timur sehingga memerlukan biaya yang cukup besar.
2) Terbatasnya pendidik PAUD yang memenuhi persyaratan, terutama bagi calon peserta BCP Diksar *stunting* di wilayah khusus atau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
3) Sulitnya mendapatkan rekomendasi nama calon peserta kegiatan dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota, terutama di kabupaten/kota atau wilayah 3T.

Hal ini diperkuat dengan hasil *grand tour* yang telah dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dan observasi pada beberapa peserta pelatihan, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu:

1) Pengetahuan dan pemahaman tentang *stunting* masih minim dan penuh miskonsepsi.
2) Kemampuan dalam *public speaking* masih rendah dan masih kesulitan untuk komunikasi dengan orang tua.
3) Keterampilan membuat media pembelajaran terbatas, dimana penguasaan teknologi masih kurang.
4) Kemampuan asesmen pertumbuhan dan perkembangan anak tidak memadai
5) Belum memahami peran sebagai agen perubahan pencegahan stunting. Adanya persepsi bahwa masalah *stunting* hanya tanggung jawab petugas kesehatan, bukan guru PAUD.
6) Kurang percaya diri menjadi pelatih. Adanya perasaan minder, ragu, cemas, takut salah, dan gugup saat menjadi pelatih.
7) Lemah dalam pengelolaan kelas/pelatihan untuk orang dewasa.
8) Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi guru untuk menjadi pelatih.

[31] Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting, "Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023," 2023, hal. 35.

Kondisi di atas berimplikasi pada lambatnya proses sosialisasi pengetahuan dan keterampilan penanganan *stunting* kepada guru PAUD. Akibatnya, target nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 untuk melatih desa dan kelurahan dalam menangani *stunting* pada tahun 2024 belum tercapai. Mengingat peran strategis yang dimainkan oleh guru PAUD dalam mencegah dan menangani *stunting*, urgensi untuk menemukan solusi untuk masalah ini semakin meningkat. Supaya dapat berkontribusi secara efektif dalam deteksi dini, edukasi, dan intervensi *stunting*, guru PAUD harus terlibat dalam interaksi yang dekat, langsung, dan berkelanjutan dengan anak usia dini dan orang tua mereka, seperti yang disoroti oleh Utami dalam publikasi Direktorat Guru PAUD dan PNF.[32]

Bimbingan teknis merupakan salah satu metode untuk meningkatkan kompetensi, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Diharapkan dengan adanya peningkatan kompetensi ini dapat mengurangi kesenjangan kompetensi peserta sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.[33] Guru PAUD dapat mengikuti program Bimbingan Teknis Calon Pelatih selama 7 hari secara tatap muka (*offline*) pada tahun 2024 melalui Tim Kerja RAN PAUD HI dan *Stunting*. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan berupa pelatihan/bimbingan teknis bagi calon pelatih percepatan penurunan *stunting* (PPS) dengan perwakilan guru PAUD dari setiap Kabupaten/Kota. Sementara itu, pendidik PAUD di kecamatan dan desa mendapatkan pembekalan mengenai penanganan *stunting* sebagai tindak lanjut dari pelatihan dan bimbingan teknis calon pelatih.[34] Sehingga tujuan dari diadakannya Diklat BCP PPS ini untuk bertujuan untuk membekali para guru dengan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang mereka butuhkan.

---

[32] Utami, "Pentingnya Pengetahuan Stunting bagi Guru PAUD."
[33] Mikael Mahin, "Pengembangan Aparatur Sipil Negara Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang," *FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21, no. 2 (2023): hal. 230.
[34] Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, "Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Teknis Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Satuan PAUD," hal. 2.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menunjukkan bahwa kompetensi guru di wilayah Jawa dan Indonesia Timur masih rendah.[35] Kemudian, peneliti mengambil wilayah tersebut, dikarenakan sebagian besar peserta pelatihan BCP PPS tahun 2024 berasal dari Jawa dan Indonesia Timur, sehingga dapat memfokuskan penelitian pada dua wilayah ini membuat proses penelitian lebih efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pelatihan Bimbingan Teknis Calon Pelatih Percepatan Penurunan *Stunting* Terhadap Kompetensi Guru PAUD Sebagai Pelatih PPS di Jawa dan Indonesia Timur**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kualifikasi dan kompetensi guru PAUD masih rendah dan tidak merata.
2. Banyak guru PAUD belum bersertifikat dan tidak memenuhi standar profesional.
3. Pengawasan terhadap mutu lembaga PAUD masih lemah.
4. Kompetensi teknis dan non-teknis guru PAUD dalam mendukung program penurunan *stunting* masih belum memadai.
5. Dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi guru masih kurang.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai Pelatihan BCP PPS Terhadap Kompetensi Guru PAUD Sebagai Pelatih PPS. Dengan pelatihan BCP PPS sebagai variabel X (variabel bebas) dan kompetensi guru PAUD sebagai pelatih PPS sebagai variabel Y (variabel terikat). Kemudian dibatasi pada pelatihan angkatan 1 sampai angkatan 5 pada tahun 2024, dan dibatasi pada peserta guru PAUD yang berasal dari Jawa dan Indonesia Timur.

---

[35] Mediana, "Kualitas Sebagian Guru Masih Rendah, Hasil Pendidikan Belum Merata."

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Apakah terdapat pengaruh pelatihan BCP PPS terhadap kompetensi guru PAUD sebagai pelatih PPS?".

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pelatihan BCP PPS terhadap peningkatan kompetensi guru PAUD sebagai pelatih PPS di Jawa dan Indonesia Timur tahun 2024.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai bentuk kajian teori dalam memahami tentang pengaruh pelatihan BCP PPS terhadap peningkatan kompetensi guru PAUD sebagai pelatih di Jawa dan Indonesia Timur tahun 2024.

2. Manfaat Praktis
   a) Bagi Direktorat Guru PAUD dan PNF, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan program pelatihan BCP PPS.
   b) Bagi guru PAUD, penelitian ini dapat digunakan untuk Mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang *stunting* dan cara pencegahannya, serta meningkatkan kesadaran tentang peran penting mereka dalam percepatan penurunan *stunting*.
   c) Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi tentang pelatihan BCP PPS terhadap kompetensi guru PAUD sebagai pelatih PPS.
   d) Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terkait pelatihan BCP PPS terhadap peningkatan kompetensi.